

**PERBANDINGAN KEBIJAKAN ADAM MALIK, MOCHTAR
KUSUMAATMADJA DAN ALI ALATAS TERHADAP POLITIK LUAR
NEGERI BEBAS AKTIF INDONESIA PADA MASA ORDE BARU**

Oleh
Fiky Arista, Suwirta dan Farida Sarimaya¹

ABSTRAK

Artikel ini berjudul “Perbandingan Kebijakan Adam Malik, Mochtar Kusumaatmadja dan Ali Alatas Terhadap Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Pada Masa Orde Baru”. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Orde Baru dalam mempertahankan politik luar negeri bebas aktif yang diambil oleh Adam Malik, Mochtar Kusumaatmadja dan Ali Alatas. Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perbandingan Kebijakan Adam Malik, Mochtar Kusumaatmadja Dan Ali Alatas Terhadap Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Pada Masa Orde Baru? Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode historis yang terdiri dari empat tahap yaitu, heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Dalam mengkaji pertanyaan penelitian, penulis menggunakan pendekatan interdisipliner dengan menggunakan beberapa konsep dari ilmu politik. Hasil penelitian yang telah penulis dapatkan adalah Adam Malik, Mochtar Kusumaatmadja dan Ali Alatas memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda sehingga dalam mengemban jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri pun berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari perbedaan fokus mereka dalam mengambil suatu kebijakan luar negeri. Adam Malik yang masih mengalami masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru lebih berfokus kepada penyelesaian masalah-masalah yang terjadi dalam pemerintahan sebelumnya. Mochtar Kusumaatmadja fokus kebijakannya terletak kepada Wawasan Nusantara dan hukum internasional. Sedangkan Ali Alatas lebih terfokus kepada masalah HAM dan menjadikan Indonesia sebagai Ketua GNB. Selain itu, ketiga Menteri Luar Negeri lewat kebijakannya juga menjadikan Indonesia aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah regional dan internasional, serta organisasi-organisasi non blok.

Kata Kunci : kebijakan politik luar negeri, politik luar negeri bebas aktif, non blok.

ABSTRACT

This article entitled "The Comparison of Adam Malik, Mochtar Kusumaatmadja and Ali Alatas Policies Against Independent-Active Foreign Policy In Indonesia During The New Order". The writing is motivated by the author interest to determine the policies taken by the New Order government in maintaining a free

¹ Penulis adalah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Drs. Suwirta, M.Hum sebagai Pembimbing I dan Farida Sarimaya, S.Pd, M.Si sebagai Pembimbing II. Penulis dapat dihubungi melalui nomor 081802172462 atau email fiky.arista@gmail.com

and active foreign policy taken by Adam Malik, Mochtar Kusumaatmadja, and Ali Alatas. The main issues in this research is how is the Comparison of Adam Malik, Mochtar Kusumaatmadja And Ali Alatas Policies Against Independent-Active Foreign Policy In Indonesia During The New Order? The method used in the study is the historical method consists of four phases, which are; heuristic, criticism, interpretation and historiography. In reviewing the research question, the author uses an interdisciplinary approach by using some of the concepts from political science. Based on the research, authors knew that Adam Malik, Mochtar Kusumaatmadja, and Ali Alatas had different educational backgrounds so when they are assuming his post as Foreign Minister also can be different. The difference can be seen from their focus in taking a foreign policy. Adam Malik, who is still in transition from the Old Order to the New Order, his focus was to solve the problems that occurred in the previous government. Mochtar Kusumaatmadja focuses on Archipelago and international law. Ali Alatas focuses on human rights issues and to make Indonesia as Chairman of NAM. In addition, The Three Minister of Foreign Affairs through his policy also makes Indonesia active in solving regional and international issues, as well as the Non-Aligned Organizations.

Keywords: *foreign policy, independent and active foreign policy, non-aligned.*

PENDAHULUAN

Perkembangan politik luar negeri Indonesia sangat menarik untuk diamati. Terutama politik luar negeri pada masa Orde Baru yang sangat bertolak belakang dengan Orde Lama. Sejak Orde Lama, Indonesia berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif yang pertama kali dicetuskan oleh Moh. Hatta pada tanggal 2 September 1948 di depan kelompok kerja KNIP. Dalam pidatonya Hatta mengemukakan bahwa Indonesia tidak perlu memilih pro-Amerika atau pro-Soviet, sehingga Indonesia tidak menjadi objek dalam perjuangan politik

internasional. Indonesia harus menjadi subjek yang memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri. Selanjutnya pada tanggal 16 September 1948, Hatta mengemukakan bahwa politik luar negeri Indonesia harus ditentukan oleh kepentingan negara yang dijalankan sesuai dengan situasi dan kenyataan yang sedang dihadapi (Suryadinata, 1998, hlm. 32-33).

Pada era Orde Baru, terjadi perubahan politik luar negeri yang diperkenalkan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto namun pada dasarnya tidak menampilkan unsur-unsur yang baru. Angkatan Darat

mengemban puncak politik republik dan menjadi faktor utama sejak revolusi nasional. Seperti halnya Soekarno, Soeharto pun menggunakan struktur konstitusi yang sama dengan Soekarno. Kekuasaan yang dijalankan Soeharto berdasarkan konstitusi yang ditegaskan sebagai sumber keabsahan politik. Hal ini dikarenakan UUD 1945 sejalan dengan tujuan politik Soeharto dan juga karena persepsinya mengenai kebutuhan utama negara Indonesia (Leifer, 1989, hlm. 161-162).

Kepentingan Indonesia pada masa Orde Baru adalah pembangunan ekonomi negara yang di masa Orde Lama kurang diperhatikan. Maka politik luar negeri Indonesia kala itu ditujukan untuk kepentingan bangsa melalui pembangunan. Indonesia menjalankan politik luar negeri bertetangga baik yang ditandai dengan penyelesaian konfrontasi Indonesia-Malaysia, turut serta dalam mendirikan organisasi regional ASEAN dan kembali menjadi anggota PBB. Hal tersebut membuat Indonesia mendapatkan beberapa keuntungan, di antaranya adalah mendapatkan pinjaman dari negara-negara yang tergabung dalam IGGI (*Inter-*

governmental Group on Indonesia) yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, Belanda, Denmark, Belgia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman Barat, Kanada, Perancis, Selandia Baru dan Swiss (Malik, 1979c, hlm. 53).

Pemerintah Orde Baru menjalankan politik luar negeri yang *low profile*, yaitu suatu politik luar negeri yang berorientasi pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Dalam melakukan upaya-upaya stabilisasi ekonomi yang akan berimbas pada kesejahteraan rakyat, Indonesia membutuhkan kerjasama dengan negara lain, terutama untuk peminjaman modal dan penanggungan hutang. Maka ketika Adam Malik menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, ia menyatakan akan membuka hubungan seluas mungkin dengan dunia internasional (Bandoro, 1994, hlm. 1-2). Namun konotasi membuka hubungan seluas mungkin dengan dunia internasional sering disalahkan sebagai Indonesia yang mulai condong ke Blok Barat.

Politik luar negeri bebas aktif Indonesia pada masa Orde Baru menarik untuk dikaji. Ada banyak orang yang menganggap bahwa pada

masa Orde Baru politik luar negeri Indonesia cenderung ke Blok Barat. Anggapan ini salah satunya dapat dilihat ketika Indonesia pernah gagal ketika mencalonkan diri menjadi ketua GNB karena dianggap terlalu dekat dengan Blok Barat, serta Indonesia yang menerima bantuan dari IGGI. Di balik semua itu, penulis ingin menyampaikan bahwa selain Indonesia menjalin kerjasama dan hubungan yang baik dengan negara-negara pendonor dana, Indonesia juga melakukan banyak hal yang mencerminkan politik luar negeri bebas aktif.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah penulisan mengenai sejarah politik luar negeri bebas aktif Indonesia dan sejarah nasional, terutama pada masa Orde Baru. Penelitian ini menggunakan beberapa konsep yang diambil dari *sister discipline* yaitu ilmu politik di antaranya konsep politik luar negeri dan hubungan internasional. konsep-konsep tersebut digunakan agar lebih memahami artikel ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yakni seperangkat sarana atau sistem yang berisi asas-asas atau norma, aturan-aturan, prosedur, metode dan teknik yang harus diikuti untuk mengumpulkan segala kemungkinan saksi mata (*witness*) tentang suatu masa atau peristiwa, untuk mengevaluasi kesaksian (*testimony*) tentang saksi-saksi tersebut, untuk menyusun fakta-fakta yang telah diuji dalam hubungan-hubungan kausalnya dan akhirnya menyajikan pengetahuan yang tersusun mengenai peristiwa-peristiwa tersebut (Ismaun, 2005, hlm. 28).

Menurut Ismaun (2005, hlm. 50) ada empat langkah dalam mengembangkan metode historis, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Tahap pertama yaitu heuristik adalah mengumpulkan sumber yang relevan dengan tema kajian. Sumber yang penulis gunakan berupa sumber tertulis berupa buku, jurnal, makalah dan skripsi. Tahap kedua yaitu kritik terhadap sumber-sumber yang telah penulis peroleh pada tahap heuristik.

Melalui kritik sumber setiap data-data sejarah yang telah didapatkan diuji dulu validitas dan reliabilitasnya, sehingga semua data itu sesuai dengan fakta-fakta sejarah yang sesungguhnya (Daliman, 2012, 64-66). Dalam metode sejarah dikenal dengan dua cara melakukan kritik, yakni kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal adalah suatu penelitian atas asal usul dari sumber, suatu pemeriksaan atas catatan atau peninggalan itu sendiri untuk mendapatkan semua informasi yang mungkin, dan untuk mengetahui apakah pada suatu waktu sejak awal mulanya sumber itu telah diubah oleh orang-orang tertentu atau tidak (Sjamsuddin, 2007, hlm. 133-134). Sedangkan kritik internal dilakukan untuk menguji isi dokumen. Sehingga dapat dikatakan bahwa kritik internal menekankan pada aspek isi dari sumber tersebut (Sjamsuddin, 2007, hlm. 143). Dalam melakukan kritik internal penulis melakukan uji kredibilitas. Peneliti akan menentukan sejauh mana suatu sumber dapat dipercaya (*credible*) kebenarannya dari isi informasi yang disampaikan

oleh suatu sumber atau dokumen sejarah.

Tahap ketiga adalah interpretasi, yaitu penulis memberikan penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang telah didapatkan dan sudah melalui kritik eksternal maupun internal. Pada tahap ini penulis melakukan pemberian makna terhadap data-data yang telah di dapatkan dari proses heuristik dan kritik sumber. Penulis menyusun fakta-fakta yang telah ada kemudian menafsirkannya. Historiografi merupakan tahap akhir dalam penelitian sejarah. Dalam historiografi ini dapat dilakukan melalui penyajian analitis-kritis sehingga pemaparan sejarah tidak hanya berupa narasi yang menyajikan kumpulan fakta, tetapi di dalamnya terdapat teori-teori serta penafsiran menggunakan ilmu bantu yang dapat menunjang sebuah penulisan sejarah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam melihat suatu kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin, ada berbagai faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah latar belakang kehidupan tokoh

tersebut. Adam Malik lahir di hari Minggu Pon, 22 Juli 1917 di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Beliau anak ketiga dari sepuluh bersaudara (Santosa, 2009, hlm. 225). Beliau berasal dari keluarga yang berkecukupan, kalangan yang sangat jarang dijumpai pada masa penjajahan Belanda (Malik, 1978a, hlm. 9).

Agar menjadi seorang ulama yang sesuai dengan keinginan ayahnya, Adam Malik mendapatkan pendidikan dasar di Bukit Tinggi yakni Sekolah Agama Parabek. Setelah satu tahun bersekolah di sana beliau pindah ke sekolah agama di Tanjung Pura yang bernama Al-Masrullah. Akan tetapi, beliau tidak betah bersekolah di sana dan membujuk ayahnya agar diizinkan keluar dari sekolah tersebut. Beliau membujuk ayahnya selama dua tahun dan mengatakan lebih tertarik untuk belajar berdagang agar dapat menjadi seorang pedagang yang sukses seperti ayahnya (Malik, 1978a, hlm. 13-16).

Sejak tahun 1930-an, Adam Malik telah ikut serta dalam dunia politik Indonesia. Pada tahun 1931, Adam Malik menjadi anggota kepanduan Hisbul Wathan, suatu

organisasi yang bernaung di bawah Muhammadiyah. Lalu beliau juga mendirikan organisasi badminton yang bernama Indonesia Muda cabang Pematang Siantar. Organisasi tersebut merupakan sebuah batu loncatan dalam menambah berbagai pengalaman menjalankan sebuah organisasi. Kemudian beliau mendirikan PARTINDO (Partai Indonesia) cabang Siantar dan dipercaya sebagai ketua cabang. Setelah bergabung dengan Partindo, Adam Malik mulai mengenal dunia pers. Beliau aktif dalam pers dengan cara menerbitkan beberapa karangan dalam harian *Pelita Andalas* dan Majalah Partindo (Malik, 1978a, hlm. 17-19).

Ketika menjadi Menteri Luar Negeri di tahun 1966-1978, Adam Malik mengalami masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Sabir (1987, hlm. 197) mengemukakan bahwa pada upacara memperkenalkan diri di depan karyawan Departemen Luar Negeri tanggal 23 Maret 1966, Adam Malik menyampaikan pidatonya yang berisi tugas Departemen Luar Negeri dalam alam Orde Baru, antara lain bahwa Departemen Luar Negeri harus :

“Mengembalikan kewibawaan pemerintah di mata rakyat, dan mengembalikan kewibawaan Republik Indonesia di mata dunia internasional setelah mengalami kerusakan-kerusakan sebagai akibat kebijaksanaan politik luar negeri di masa lalu. Selanjutnya dinyatakan bahwa dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia, Departemen Luar Negeri berpangkal pada realitas kepentingan nasional, baik jangka pendek, maupun jangka panjang dan berusaha menghindarkan diri dari pemikiran yang penuh angan-angan (*wishful thinking*) dan politik mercusuar yang dapat merugikan negara”.

Dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri yang diambil oleh Adam Malik di masa awal kepemimpinannya adalah upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya. Contohnya adalah menyelesaikan konfrontasi Indonesia-Malaysia, kembali menjadi anggota PBB dan mendirikan organisasi regional yang bernama ASEAN.

Menteri Luar Negeri kedua pada masa Orde Baru adalah Mochtar Kusumaatmadja. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 17 Februari 1929

dan merupakan putera tertua dari R. Taslim dan Sulmini (Sumardjo, 1999, hlm. 3). Mochtar Kusumaatmadja menempuh pendidikan dasar dan SMP di Kota Jakarta. Mochtar Kusumaatmadja bersekolah di taman kanak-kanak *Freubel School* dan *Europeesche Lagere School* (ELS), sekolah yang diperuntukkan bagi keturunan Eropa, Timur Asing, dan bumiputera dari tokoh terkemuka (Pane, 2015, hlm. 6). Ketika perang kemerdekaan pada tahun 1944 terjadi, keluarga R. Taslim pindah ke Cirebon, sehingga Mochtar menyelesaikan pendidikan SMP di kota Cirebon dan masuk Tentara Pelajar cabang Cirebon (Sumardjo, 1999, hlm. 4). Ia meneruskan pendidikan SMA di sekolah yang dikelola oleh Sutan Takdir Alisyahbana. Setamat dari SMA ia memasuki Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (PTHI) jurusan Hukum Internasional, tetapi baru sekitar satu tahun PTHI bergabung dengan Universitas Indonesia. Pada tahun 1962, beliau memperoleh gelar doktornya di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Latar belakang pendidikannya dalam bidang hukum menjadikan

Mochtar Kusumaatmadja sangat memperhatikan kepentingan-kepentingan hukum Indonesia di dunia internasional. Maka Mochtar Kusumaatmadja tetap memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara yang sudah dirintisnya sejak Deklarasi Djuanda. Selain itu, Mochtar Kusumaatmadja juga turut aktif dalam perumusan hukum internasional di PBB.

Menteri Luar Negeri ketiga sekaligus sebagai pengganti Mochtar Kusumaatmadja adalah Ali Alatas atau lebih dikenal dengan Alex Alatas. Ali Alatas lahir di Jakarta pada tanggal 4 November 1932. Di tahun 1975-1976, Ali Alatas menjadi Staf Ahli dan Kepala Sekretaris Pribadi Menteri Luar Negeri Adam Malik pada masa Kabinet Pembangunan II dari tahun 1975-1976. Selanjutnya beliau aktif menjadi Wakil Tetap RI di PBB dari tahun 1976-1978. Lalu beliau ditugaskan untuk menjadi Sekretaris Wakil Presiden sampai tahun 1982 (Nasoetion, 2009, hlm. 173-174). Ada beberapa hal yang dilakukan Ali Alatas selama kepemimpinannya sebagai Menteri Luar Negeri, di antaranya adalah menyelesaikan

masalah Timor Timur, memperbaiki hubungan Indonesia-Australia dan mendukung kemerdekaan Palestina.

Kementerian Luar Negeri yang secara khusus mengurus masalah-masalah internasional, menjadi ujung tombak dalam dunia diplomasi Indonesia. Prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif menjadikan Adam Malik, Mochtar Kusumaatmadja dan Ali Alatas selalu melakukan diplomasi dalam menghadapi berbagai persoalan di dunia internasional. Ketiganya memiliki penafsiran yang hampir sama mengenai politik luar negeri bebas aktif. Pada intinya, mereka memahami bahwa politik luar negeri bebas aktif berbeda dengan netralitas. Indonesia harus menempatkan dirinya dalam posisi tidak memihak Blok Barat dan Blok Timur. Posisi Indonesia dalam politik bebas aktif adalah selalu memiliki pendirian sendiri dalam menyelesaikan masalah internasional. Salah satunya adalah dengan cara memelihara perdamaian di dunia. Ketiganya pun tentunya memiliki tujuan yang sama tentang arah kebijakan politik luar negeri bebas aktif, yaitu menjaga perdamaian

kawasan dan dunia yang pada akhirnya berimbas pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Maka, ketiga Menteri Luar Negeri di masa Orde Baru tersebut menjalin hubungan baik dengan negara-negara maju, salah satunya dengan negara-negara yang tergabung dalam IGGI.

Landasan Indonesia dalam menerapkan politik luar negeri Indonesia adalah alinea keempat dari Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Dari kalimat tersebut dapat diketahui dalam politik luar negeri Indonesia, yaitu menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Maka pada masa Orde Baru, Indonesia telah melakukan hal berikut, berusaha menjalin kembali hubungan dengan Republik Rakyat Cina (RRC), turut sertanya Indonesia dalam menangani masalah HAM dan kolonialisme serta peran Indonesia dalam organisasi non-blok.

Pertama, Indonesia berusaha menjalin kembali hubungan dengan RRC. Hubungan diplomatik dengan RRC resmi dibekukan oleh Jakarta pada 31 Oktober 1967 (Ricklefs, 2010,

hlm. 599). Para pemimpin Indonesia pada masa Orde Baru memiliki dua pandangan mengenai hubungan Indonesia-RRC, kedua pandangan tersebut yakni kelompok pro-normalisasi dan kelompok anti-normalisasi. Kelompok pro-normalisasi khususnya Adam Malik, Mochtar Kusumaatmadja dan Ali Alatas sebagai bagian dari Departemen Luar Negeri berpendapat bahwa jika normalisasi dilakukan akan meningkatkan citra Indonesia sebagai negara non blok. Sedangkan kelompok anti-normalisasi terdiri dari Presiden Soeharto, militer di HANKAM, dan kelompok Islam (Suryadinata, 1998, hlm. 133).

Adam Malik dalam sebuah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri RRC memberikan keterangan sebagai berikut :

“RRC memerlukan waktu untuk memulihkan hubungan diplomatiknya dengan Indonesia” (Malik, 1979c, hlm. 180).

Memasuki periode kedua masa jabatan Mochtar Kusumaatmadja, terutama sejak tahun 1984, Soeharto membuat kebijakan yang lebih liberal terhadap RRC karena tatanan ekonomi

dan juga keinginannya untuk memainkan peran utama dalam masalah-masalah luar negeri (Putri, 2009, hlm. 3). Pada bulan November 1984, Mochtar Kusumaatmadja mengumumkan keinginan Indonesia untuk membuka kembali perdagangan langsung dengan RRC, meskipun keinginan tersebut tidak termasuk melakukan normalisasi (Suryadinata, 1998, hlm. 136).

Pemulihan hubungan diplomatik Indonesia-RRC tersebut pada masa Mochtar Kusumaatmadja menjadi Menteri Luar Negeri dilakukan secara tidak resmi. Pada bulan April 1985, Wu Xueqian selaku Menteri Luar Negeri RRC menunjukkan niat dengan cara menghadiri HUT 30 Tahun KAA. Ketika menghadiri acara tersebut, Mochtar Kusumaatmadja dan Wu Xueqian menyetujui bahwa pada tahun 1985 Indonesia-RRC akan melakukan hubungan perdagangan langsung secara bertahap (Widjaja, 1986, hlm. 55-56). Upaya dalam memperbaiki hubungan dagang Indonesia-RRC mendapatkan tanggapan yang baik dari pemerintah Indonesia. Terbukti dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No.

9/1985 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hubungan Dagang Langsung Antara Indonesia dan Cina pada tanggal 23 Juli 1985 (Sukma, 1994, hlm. 70).

Hubungan Indonesia-RRC semakin membaik pada masa Ali Alatas menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Pada saat itu, Indonesia tidak menganggap RRC sebagai ancaman lagi dan mulai membina hubungan yang lebih praktis dan pragmatis. Namun menurut Ali Alatas, Indonesia tidak perlu terlalu terburu-buru dalam memperbaiki hubungan dengan RRC, meskipun pada saat itu negara-negara anggota ASEAN telah terlebih dahulu melakukan normalisasi hubungan dengan RRC. Ali Alatas mempersilahkan dan menyatakan Indonesia tidak ingin membuat negara lain tergesa-gesa memperbaiki hubungan mereka hanya karena Indonesia (Dewabrata, 2015, hlm. 64).

Secara mengejutkan pada tanggal 23 Februari 1989 Indonesia mengumumkan bahwa ada kemungkinan bagi Jakarta dan RRC untuk membuka kembali hubungan diplomatik. (Liji, 2012, hlm. 523) Pada bulan Juli 1989, atas undangan

Menteri Luar Negeri Qian Qichen, Ali Alatas melakukan kunjungan resmi ke RRC (Putri, 2009, hlm. 4). Pada tanggal 1-3 Juli 1990, Menteri Luar Negeri Ali Alatas berkunjung ke Beijing untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri guna membahas kapan dan bagaimana hubungan diplomatik Indonesia-RRC akan dicairkan kembali (Santi, 2010, Th). Pada tanggal 6 Agustus 1990, atas undangan Presiden Soeharto, Li Peng dengan didampingi Qian Qichen secara resmi berkunjung ke Indonesia dan mendapatkan sambutan yang meriah (Liji, 2012, hlm. 523). Pada tanggal 8 Agustus 1990, Ali Alatas dan Qian Qichen menandatangani kesepakatan bernama *Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People Republic of China on the Resumption of Diplomatic Relations* di Istana Negara (Sukma, 1994, hlm. 80).

Kedua, turut sertanya Indonesia dalam menangani masalah HAM dan kolonialisasi. Perubahan mendasar dalam politik internasional pasca berakhirnya Perang Dingin tahun

1990-an memunculkan isu-isu baru dan aktor-aktor baru dalam dunia diplomasi. Upaya dalam diplomasi HAM bertujuan untuk menciptakan lingkungan internasional yang kondusif bagi tercapainya tujuan-tujuan nasional dalam pembangunan (Djelantik, 2006, hlm. 410-412).

Era Orde Baru banyak diwarnai oleh isu-isu pelanggaran HAM. Pelanggaran seringkali terjadi kemudian dijadikan kepala berita di media massa internasional, terutama insiden Dili Timor Timur. Hal tersebut menjadi hambatan yang sangat besar dalam upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk mempertahankan Timor Timur (Djelantik, 2006, hlm. 416). Insiden Dili bermula pada tanggal 28 Oktober 1991 bertepatan dengan Perayaan Hari Sumpah Pemuda muncul demonstrasi di Dili yang menyulut bentrokan fisik. Peristiwa tersebut dilatarbelakangi oleh rencana kunjungan anggota parlemen Portugis ke Timor Timur yang menyulut semangat kalangan muda di sana untuk berdemonstrasi kepada Jakarta. Dari bentrokan fisik tersebut, dua orang pengunjung rasa terbunuh. Pada tanggal 12 November

1991, sekelompok besar masyarakat Timor Timur mengunjungi pemakaman kedua korban. Aparat keamanan terperanjat. Dilaporkan dalam hal ini militer menggunakan kekerasan, sehingga mengakibatkan banyak korban berjatuhan (Suryadinata, 1998, hlm. 77).

Kejadian demonstrasi anti-Jakarta di Dili pada 12 November 1991 mengakibatkan kematian lebih dari 100 orang. Hal tersebut seakan membuyarkan upaya-upaya Ali Alatas untuk membuat dunia menerima Timor Timur sebagai wilayah Indonesia. Berkat kejadian itu, Indonesia mendapatkan kecaman yang keras dari masyarakat internasional. Konsekuensinya adalah Kanada, Belanda dan Denmark memutuskan bantuan ekonomi terhadap Indonesia (Suryadinata, 1998, hlm. 74).

Setelah kejadian itu, Jenderal Try Sutrisno mengeluarkan pernyataan bahwa militer telah diserang oleh kerumunan dan ketika mereka bereaksi, 19 orang tertembak mati. Masyarakat Timor Timur memprotes bahwa militer menembak mereka tanpa peringatan terlebih dahulu. Mereka mengatakan bahwa

lebih dari 200 orang terbunuh, dan sejumlah besar orang terluka (Suryadinata, 1998, hlm. 77).

Ketika peristiwa Dili terjadi, Presiden Soeharto sedang dalam perjalanan keluar negeri. Tekanan dari dunia internasional membuatnya memenuhi tuntutan dari luar untuk membentuk Komisi Penyelidik Nasional (KPN) dalam rangka menyelidiki peristiwa tersebut. Komisi dikepalai oleh Hakim Pengadilan Tinggi, M. Djaelani dengan anggota dari kalangan sipil dan independen. Ketika hasil penemuan awal diungkapkan, ternyata hasilnya berbeda dengan versi militer. Laporan versi KPN menyatakan bahwa 50 orang terbunuh dan 90 orang hilang. Ali Alatas dikirim ke luar negeri untuk menjelaskan peristiwa tersebut kepada para pemimpin negara-negara asing dan misinya berhasil (Suryadinata, 1998, hlm. 78-79). Serta dalam rangkaantisipasi kritik lebih jauh dari dunia internasional, khususnya Amerika Serikat, Soeharto memerintahkan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) pada bulan Juli 1993 (Suryadinata, 1998, hlm. 182).

Di samping penyelesaian atas masalah Timor Timur, buruh Indonesia juga menjadi perhatian pemerintah Amerika yang mengancam untuk mengakhiri kemudahan-kemudahan perdagangan jika catatan HAM di Indonesia tidak membaik. Indonesia diberi waktu sampai tanggal 15 Februari 1994 untuk memperbaiki reputasi HAM-nya jika Indonesia tetap ingin menikmati tarif rendah untuk ekspor Indonesia ke Amerika di bawah *Generalized System of Preference* (GSP). Ali Atlas menyatakan secara terbuka bahwa Jakarta tidak dapat menerima kaitan antara GSP dengan hak asasi dan hak buruh. Tahun 1995, *Human Rights Watch/Asia Grup* yang berbasis di New York menuduh Indonesia tidak mengambil tindakan untuk menjamin hak-hak buruh yang diakui secara internasional (Suryadinata, 1998, hlm. 183).

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi politik luar negeri bebas aktif juga ikut berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah kolonialisasi dan dekolonialisasi, salah satunya di Namibia. Namibia sebelumnya disebut sebagai Afrika

Barat Daya, bekas jajahan Jerman, setelah Perang Dunia I oleh Liga Bangsa-Bangsa diserahkan sebagai daerah mandat kepada Afrika Selatan. Setelah Perang Dunia II, Afrika Selatan menolak untuk menyerahkan Namibia di bawah Perwakilan PBB. Pada tahun 1966 PBB memutuskan berakhirnya mandat Afrika Selatan atas Namibia dan diperkuat oleh keputusan Mahkamah Internasional tahun 1971 (Widjaja, 1986, hlm. 69).

Indonesia bersikap tegas dan mendukung sepenuhnya rakyat Namibia dalam menentang politik apartheid, suatu sistem perbudakan yang kejam dan tidak berperikemanusiaan yang bertentangan dengan HAM, Dasasila Bandung dan Piagam PBB. Rencana rezim Afrika Selatan (Pretoria) untuk membentuk Pemerintah Lokal Namibia mendapat kecaman dari berbagai negara. Rencana Afrika Selatan ditentang karena bertentangan dengan Piagam PBB dan resolusi PBB tentang Namibia. Pembentukan pemerintahan ini tidak akan membantu dalam pemecahan masalah Namibia, bahkan akan menambah kekacauan dan tidak akan berdampak

pada kemerdekaan Namibia sendiri. Afrika Selatan jelas menolak resolusi PBB untuk kemerdekaan Namibia. Masalah Namibia pun sebenarnya cukup sensitif karena selain berhubungan dengan Afrika Selatan juga erat kaitannya dengan tentara Kuba di Angola (Widjaja, 1986, hlm. 70-71).

Seluruh negara di dunia mendesak agar Afrika Selatan melaksanakan resolusi PBB untuk kemerdekaan Namibia. Banyak pula yang menginginkan pemberian sanksi terhadap Afrika Selatan jika terus menghalang-halangi rencana PBB. Dalam sidang istimewa Dewan Keamanan PBB mengenai Namibia, Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa situasi benar-benar mencerminkan ciri kolonialisme klasik yang menjijikan dan ini merupakan tantangan yang unik terhadap rasa keadilan moralitas (Widjaja, 1986, hlm. 72).

Indonesia menginginkan Dewan Keamanan PBB mengambil keputusan yang menetapkan pelaksanaan segera serta tak bersyarat resolusi PBB No. 435 tahun 1978, sebagai satu-satunya jalan penyelesaian masalah Namibia.

Indonesia ingin agar Dewan Keamanan PBB mengutuk dan menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan lokal Namibia tidak sah, agar resolusi yang dihasilkan mengenai masalah Namibia mengambil sikap yang tegas kepada pembangkangan Afrika Selatan terhadap resolusi tersebut. Sikap Indonesia yang terbukti konsisten dalam mengecam Afrika Selatan atas pendudukan di Namibia dibuktikan dalam resolusi Majelis Umum PBB No. 2248, telah dibentuk Dewan PBB untuk Namibia dan Indonesia menjadi anggota ke-31. Tugas dari dewan tersebut adalah mengelola wilayah Afrika Barat Daya sampai kemerdekaannya dengan partisipasi semaksimal mungkin dari rakyat-rakyat di wilayah tersebut (Widjaja, 1986, hlm. 72-73).

Dalam pidato pada Konferensi Internasional mengenai Sanksi terhadap Republik Afrika Selatan di Paris pada 22 Mei 1981, Mochtar Kusumaatmadja menyatakan hal berikut :

“Konferensi Sanksi terhadap Afrika Selatan adalah wujud kepedulian bahwa kami serius mengenai situasi yang

memburuk di Afrika Selatan dan wilayah yang berada di sekitar Afrika Selatan sebagai akibat dari kebijakan dan tindakan rezim Pretoria dalam mengkonsolidasikan sistem apartheid mereka secara terus menerus dan pendudukan terhadap Namibia. Represi brutal terhadap lawan apartheid, itu merupakan langkah baru dari agresi terhadap negara-negara tetangga dan salah satu tindakan pencaplokan terhadap Namibia. Hal tersebut merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan, tidak hanya ke Afrika Selatan tetapi untuk seluruh dunia” (Kusumaatmadja, 1982, hlm. 76).

Pada tanggal 21 Maret 1990 Namibia merdeka dan Indonesia membuka kantor perwakilannya di Windhoek pada tahun 1994. Pada masa Ali Alatas sebagai Menteri Luar Negeri, Indonesia dan Namibia memiliki hubungan yang solid yang ditandai dengan kerjasama yang dilakukan demi kepentingan bersama. Indonesia bersimpati terhadap perjuangan rakyat Namibia untuk memperjuangkan kemerdekaannya dari rezim apartheid. Dalam rangka membantu Namibia dalam memperjuangkan kemerdekaannya, Indonesia bersama dengan negara-

negara di Asia dan Pasifik, Eropa, Kanada dan Amerika Latin melalui jaringan diplomatik mengupayakan kemerdekaan Namibia. Hubungan Indonesia-Namibia yang baik dapat dilihat dari kunjungan Jaksa Agung Namibia yang berkunjung pada Februari 1997. Selanjutnya Presiden Namibia Dr. Sam Nujoma pada tanggal 31 Juli-4 Agustus 1997 (<http://www.kemlu.go.id/windhoek/id/Pages/Namibia1.aspx>).

Ketiga, peran Indonesia dalam organisasi non blok. Sepanjang eksistensi Indonesia semenjak kemerdekaannya di tahun 1945, Indonesia telah aktif dalam beberapa organisasi non blok, yaitu ASEAN, PBB, dan GNB. Organisasi regional ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) menjadi landasan regional Indonesia dalam mengambil kebijakan politik luar negeri (Ricklefs, 2010, hlm. 612).

Menurut Adam Malik, latar belakang berdirinya ASEAN tidak terlepas dari kondisi pada Perang Dunia II. Semenjak akhir Perang Dunia II, perkembangan politik mengalami pengkotak-kotakan, dan perkembangan ekonomi dunia

mengalami kecenderungan ke arah pemusatan. Di Afrika masyarakat yang hidup di daerah-daerah terjajah berupaya membebaskan wilayahnya dari penjajahan. Di sisi lain, pasca Perang Dunia II memberikan dampak bagi perkembangan teknologi yang telah dicapai oleh negara-negara Barat dan memaksa negara-negara bekas jajahan yang masih berada di luar arus perekonomian dunia untuk mempercepat proses industrialisasi, dan masuk ke dalam jaringan ekonomi internasional. Alasan itu mendorong pemikiran untuk membentuk suatu badan regional bagi negara-negara di Asia Tenggara yang dapat menampung dan menyerap kedua perkembangan tersebut. Maka lahirlah ASEAN di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Pendiri ASEAN adalah perwakilan dari lima negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Narciso Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Thanat Khoman dari Thailand dan Rajaratnan dari Singapura (Malik, 1979c, hlm. 80). Adam Malik berharap bahwa kerjasama regional ini bisa berfungsi sebagai penyeimbang terhadap

pengaruh besar Jepang dan Amerika terhadap Indonesia (Ricklefs, 2010, hlm. 612).

Menurut Ali Alatas, selama dua periode kiprah Mochtar Kusumaatmadja menjadi Menteri Luar Negeri menorehkan catatan tersendiri bagi Indonesia. Semasa jabatannya beliau menjabarkan kepentingan nasional Indonesia dalam pelaksanaan politik luar negeri melalui “pendekatan lingkaran konsentris”. Dalam hal ini, ASEAN ditetapkan sebagai *sokoguru* politik luar negeri Indonesia (Pane, 2015, hlm. 346).

Pada masa Mochtar Kusumaatmadja menjadi Menteri Luar Negeri, dilakukan suatu Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN III yang diselenggarakan pada 14-15 Desember 1987 di Manila. Pada kesempatan tersebut dilakukan penilaian terhadap keseluruhan kinerja ASEAN selama 20 tahun, dan tanggapan ASEAN terhadap perubahan situasi internasional, terutama situasi ekonomi internasional dan menghasilkan *Manila Declaration of 1987 (Declaration of ASEAN Resolve)* (Kansil, 1989, hlm. 366-367).

Pada masa Ali Alatas menjadi Menteri Luar Negeri, ada hal yang penting yang telah terbentuk dalam organisasi ASEAN, yakni menyepakati pembentukan AFTA (*ASEAN Free Trade Area*). Suatu kawasan perdagangan bebas, idealnya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi kawasan yang kokoh (Syahperi, 1999, hlm. 78). Di masa Ali Alatas menjadi Menteri Luar Negeri, ASEAN tidak lagi menjadi organisasi utama yang diikuti Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari keinginan Soeharto untuk menjadi Ketua GNB, sehingga peran Indonesia di ASEAN mengalami penurunan.

Indonesia juga aktif dalam organisasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Adam Malik memiliki pandangan tersendiri terhadap PBB, karena beliau pernah mendapat kepercayaan sebagai Ketua Sidang Umum PBB ke-26 untuk masa jabatan 1971-1972. Beliau telah banyak mempelajari masalah-masalah dalam tubuh PBB dan menyatakan kesannya di masa awal menduduki jabatan Sidang Umum PBB :

“Kesan yang pertama saya peroleh pada waktu itu ialah adanya kecenderungan yang

semakin tampak di sementara kalangan untuk menganggap PBB sebagai lembaga yang sudah tidak relevan lagi. Pada bidang-bidang tertentu anggapan seperti itu memang ada dasarnya. Saya melihat bahwa dalam menghadapi persoalan yang eksplosif antara dua negara yang bersengketa, PBB memang tidak mempunyai kekuasaan penuh atau tidak diberi gerak bebas untuk langsung menentukan kebijaksanaannya demi penyelesaian persoalan yang cepat. Lagi pula, negara-negara biasanya cenderung untuk mencari penyelesaian di luar pagar PBB” (Malik, 1979c, hlm. 168).

Adam Malik menganggap PBB seringkali tidak mampu menyelesaikan pertikaian-pertikaian, terutama perselisihan politik, termasuk soal keanggotaan PBB. Cara pengambilan keputusan oleh Dewan Keamanan dengan hak veto oleh anggota tetap sering kali berbeda dengan keputusan mayoritas dalam Sidang Umum. Keefektifan dan wibawa PBB terganggu oleh hak veto Dewan Keamanan, dan akan lebih baik jika badan tersebut mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan kesepakatan dari mayoritas di *General Assembly* (Malik, 1976, hlm. 34).

Majelis Umum PBB hanya berfungsi sebagai Penasehat Dewan Keamanan yang hanya bisa memberi *recommendations with respect to the maintenance of international peace and security* (memberi anjuran yang bertalian dengan usaha menjamin perdamaian dan keamanan internasional) (Malik, 1979c, hlm. 172).

Di masa awal jabatan Mochtar Kusumaatmadja menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Adam Malik, pada tahun 1979 beliau ke New York untuk mengikuti Sidang Majelis Umum PBB. Dalam sidang-sidang Majelis Umum PBB, Indonesia tidak pernah absen dan selalu aktif dalam mengikuti pembahasan-pembahasan aktual yang terjadi di dunia (Pane, 2015, hlm. 371-372). Mochtar Kusumaatmadja memiliki pandangan sendiri mengenai PBB. Menurutnya, PBB masih relevan dan sangat penting dalam membantu penyelesaian masalah di dunia. Dalam wawancara terhadap stasiun TVRI tanggal 12 Oktober 1985, Mochtar Kusumaatmadja mengatakan :

“PBB sebagai tempat pelaksanaan dari multilateralisme dengan

kekurangan dan kelemahan-kelemahannya, menurut kita masih merupakan wahana terbaik dalam menangani masalah-masalah umat manusia dan mendesak” (Sabir, 1987, hlm. 98).

Dalam pidatonya di depan Majelis Umum PBB, Mochtar Kusumaatmadja menyerukan pula :

“Agar dalam melihat peran PBB untuk masa depan, negara-negara hendaknya tidak menangisi nasib ataupun menepuk dada, melainkan berusaha menarik pelajaran yang positif dari pengalaman. Mereka harus mengakui, bahwa tantangan yang dihadapi dan kemajuan yang dicapai PBB selama ini mengharuskan mereka untuk memperkuat kerjasama multilateral. Indonesia sendiri tetap yakin, bahwa multilateralisme merupakan satu-satunya pendekatan untuk menghadapi realitas dunia dewasa ini, dan PBB sebagai perwujudan dari kerjasama multilateral ini perlu didukung dan diperkuat, bukannya dicemoohkan dan dikesampingkan” (Sabir, 1987, hlm. 98).

Berakhirnya Perang Dingin membuat peran PBB semakin penting dan menonjol di dunia internasional. PBB dihadapkan pada tantangan tugas yang kian banyak. Kurangnya pengalaman dalam menyelesaikan

berbagai krisis yang terjadi di dunia internasional, serta keuangan PBB yang mengalami krisis membuat beban-beban tugas PBB semakin sulit. Hal tersebut mengakibatkan kedudukan dan peran PBB, termasuk peranan dan tata cara operasional Dewan Keamanan dipertanyakan.

Ali Alatas memiliki pemikiran yang sama dengan Adam Malik dalam menyikapi berbagai tantangan yang ada dalam PBB. Indonesia tetap berpendirian perlu diadakannya restrukturisasi, revitalisasi dan demokratisasi dalam kelembagaan PBB. Beliau mengatakan bahwa hal itu sebenarnya telah disadari oleh masyarakat internasional. Setiap sistem pengelolaan global (*global governance*) dan setiap usaha menuju suatu ketertiban dunia baru, hanya bisa efektif dan diterima oleh semua pihak, jika berakar pada PBB sebagai satu-satunya lembaga universal yang dapat dijadikan mekanisme utama dan sumber keabsahan (Sejarah Diplomasi Indonesia dari Masa ke Masa Jilid IV B, 2005, hlm. 800).

Salah satu alasan pentingnya revitalisasi PBB adalah untuk menciptakan hubungan dan interaksi

yang lebih serasi dan berimbang antara badan-badan utamanya yakni Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC/*Economic and Sosial Council*) dan Sekretariat Jenderal. Hubungan yang berimbang diharapkan akan menciptakan prinsip demokrasi, semangat kebersamaan dan partisipasi semua anggota, maupun efektifitas badan-badan tersebut agar lebih terjamin. Indonesia berkeyakinan bahwa sudah tiba waktunya melakukan reformasi terhadap Dewan Keamanan karena konstelasi dunia sudah berubah secara fundamental. Reformasi itu meliputi perluasan keanggotaan anggota tetap, fungsi, lingkup agenda dan tata cara prosedurnya (Sejarah Diplomasi Indonesia dari Masa ke Masa Jilid IV B, 2005, hlm. 801).

Ali Alatas dalam Pidato Penerimaan Gelar Dr. HC dalam Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro pada tahun 1976 menyatakan :

“Indonesia telah menyatakan pendiriannya bahwa calon-calon pilihan anggota tetap baru Dewan Keamanan seyogyanya tidak hanya didasarkan atas prinsip-prinsip perimbangan geografis (*equitable geographic*

representation) semata-mata, tapi lebih didasarkan pada serangkaian kriteria objektif. Kriteria-kriteria itu secara tepat mencerminkan bobot politik, ekonomi dan kependudukan negara calon, kemampuan serta jasa-jasa nyata negara tersebut dalam rangka menyumbang pada perdamaian, keamanan dan kesejahteraan, baik di tingkat regional maupun global, dan keterikatannya untuk memikul tanggung jawab yang mengalir dari kedudukan sebagai anggota tetap Dewan Keamanan” (Sejarah Diplomasi Indonesia dari Masa ke Masa Jilid IV B, 2005, hlm. 801).

SIMPULAN

Adam Malik merupakan Menteri Luar Negeri pertama pada masa Orde Baru dalam periode 1966-1978. Beliau merubah politik Orde Lama yang cenderung konfrontatif menjadi politik bertetangga baik. Upaya Adam Malik tampaknya berhasil dan dapat dilihat dari tugas pertama yang diembannya dalam menyelesaikan Konfrontasi Indonesia-Malaysia yang dimulai pada masa Orde Lama. Mochtar Kusumaatmadja menggantikan Adam Malik menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia pada periode 1978-1988. Produk nyata pada masa Mochtar Kusumaatmadja menjabat sebagai Menteri Luar Negeri

adalah ditandatanganinya Konvensi Hukum Laut Internasional yang berakar dari Deklarasi Djuanda (13 Desember 1957). Ali Alatas menggantikan Mochtar Kusumaatmadja menjadi Menteri Luar Negeri pada periode 1988-1998. Selama masa kepemimpinannya, Indonesia sangat aktif dalam melakukan misi-misi kemanusiaan dan HAM. Misalnya pada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam membantu Namibia.

Usaha Indonesia dalam memperbaiki hubungan dengan RRC menjadi bukti tersendiri bahwa Indonesia telah menerapkan politik luar negeri bebas aktif. RRC yang identik dengan Blok Timur memiliki peran tersendiri dalam dunia ekonomi di Asia. Berlandaskan kepentingan ekonomi dan sosial, Indonesia berusaha memperbaiki hubungan Indonesia-RRC yang telah dirintis semenjak Adam Malik dan baru terealisasi ketika Ali Alatas menjadi Menteri Luar Negeri. Pada masa Adam Malik, Indonesia masih sangat sensitif terhadap isu-isu komunisme, terutama setelah tuduhan bahwa RRC ada di balik peristiwa G30S.

Memasuki masa Mochtar Kusumaatmadja menjadi Menteri Luar Negeri, telah ada kemajuan yang signifikan mengenai hubungan kedua negara yang tampak pada terjalinnya hubungan perdagangan langsung. Ketika Ali Alatas menjadi Menteri Luar Negeri, Indonesia-RRC berhasil menandatangani MOU tentang pencairan hubungan diplomatik kedua negara. peristiwa itu terjadi pada tanggal 8 Agustus 1990.

Prinsip kedua adalah senantiasa mendukung gerakan kemerdekaan. Dalam hal ini Indonesia berjuang untuk kemerdekaan Namibia. Kemerdekaan Namibia menjadi salah satu isu HAM yang paling santer terdengar di tahun 1970-an. Pendudukan yang dilakukan oleh Afrika Selatan serta isu apartheid menjadi fokus utama dalam kebijakan ini. secara umum dapat dikatakan bahwa Indonesia mendukung resolusi PBB untuk mencanangkan opsi kemerdekaan bagi Namibia. Indonesia sebagai negara yang menentang kolonialisme menjadi salah satu anggota dalam Dewan PBB untuk Namibia yang bertugas mengelola wilayah Afrika Barat Daya sampai

kemerdekaannya dengan partisipasi semaksimal mungkin dari rakyat-rakyat di wilayah tersebut.

Peran Indonesia dalam organisasi regional dan internasional juga meningkat dari waktu ke waktu. Ketika Adam Malik menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, beliau terlibat dalam pembentukan ASEAN. Maka tak heran jika Indonesia selama Orde Baru sangat aktif dalam organisasi tersebut. Memasuki Mochtar Kusumaatmadja dalam jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Adam Malik, beliau menjadikan ASEAN sebagai sokoguru politik luar negeri Indonesia. Namun dalam kepemimpinan Ali Alatas, ASEAN tidak menjadi fokus utama dalam kebijakan luar negeri. Selain ASEAN, Indonesia juga aktif dalam PBB. Adam Malik dan Ali Alatas menghendaki adanya revitalisasi dan restrukturisasi dalam PBB. Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa mencemooh PBB bukanlah hal yang patut dilakukan dan alangkah lebih baiknya jika dunia menjalin kerjasama multilateral.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandoro, B. (1994). *Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru*. Jakarta : CSIS.
- Daliman. (2012). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Djelantik, S. (2006). *Diplomasi Antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ismaun. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bandung: FPIPS IKIP Bandung.
- Kansil, C.S.T. (1989). *Hubungan Diplomatik Republik Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Kusumaatmadja, M. (1982b). *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini : Kumpulan Karangan dan Pidato*. Jakarta : Alumni.
- Liji, L. (2012). *Dari Relasi Upeti ke Mitra Strategis : 2.000 Tahun Perjalanan Hubungan Cina-Indonesia*. Jakarta : Kompas.
- Leifer, M. (1989). *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Malik, A. (1978a). *Mengabdi Republik Jilid 1 : Adam dari Andalas*. Jakarta : PT. Gunung Agung.
- Malik, A. (1979c). *Mengabdi Republik Jilid III : Angkatan Pembangunan*. Jakarta : PT. Gunung Agung.
- Pane, N. (2015). *Rekam Jejak Kebangsaan Mochtar Kusuma-Atmadja*. Jakarta : Kompas.
- Panitia Penulisan Buku Sejarah Diplomasi Republik Indonesia. (2005b). *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia Dari Masa ke Masa (Periode 1966-1995)*. Jakarta : Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Poesponegoro, M.D dan Notosusanto, N. (1993). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Ricklefs, M.C. (2010). *Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Sabir, M. (1987). *Politik Bebas Aktif*. Jakarta : CV. Haji Mas Agung.
- Santosa, K.O. (2009). *Perjalanan Sang Kenderal Soeharto (1921-2008)*. Bandung : Segi Arsy.
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Sumardjo, J. (1999). Biografi Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL. M. Dalam Komar, Mieke, Ety R. Agoes dan Eddy Damian (Penyunting), *Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik & Negarawan : Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.* (hlm. 3-28). Bandung : Alumni.
- Sukma, R. (1994). Hubungan-Indonesia-Republik Rakyat Cina: Jalan Panjang Menuju Normalisasi. Dalam Bandoro, B (Penyunting), *Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru* (hlm. 51-92). Jakarta : CSIS.

- Suryadinata, L. (1998). *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto*. Jakarta : LP3ES.
- Syahperi, J. (1999). Dinamika Hubungan Internasional Pasca Perang Dingin dan Relevansi Pendekatan Lingkaran Konsentris Kebijakan Luar Negeri Indonesia. Dalam Komar, Mieke, Ety R. Agoes dan Eddy Damian (Penyunting), *Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik & Negarawan : Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.* (hlm. 776-797). Bandung : Alumni.
- Widjaja, A.W. (1986). *Indonesia Asia Afrika Non Blok : Politik Bebas Aktif*. Jakarta : Bina Aksara.
- Dewabrata, W. (2015). *Pencairan Kembali Hubungan, Kemenangan Diplomasi Indonesia*. [Online]. Diakses dari <http://print.kompas.com/baca/2015/06/26/Pencairan-Kembali-Hubungan%2c-Kemenangan-Diplomasi-I>.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Windhoek Republik Namibia Merangkap
- Republik Angola. (Tanpa Tahun). [Online]. Diakses dari : <http://www.kemlu.go.id/windhoek/id/Pages/Namibia1.aspx>.
- Nasoetion, I.A. (2009). Ali Atlas : Pengabdian Tiada Henti. *Jurnal Diplomasi*, No. 1. Vol. 1, hlm. 173-177.
- Putri, F.T. (2009). Kebijakan Ekonomi Indonesia-RRC Masa Soeharto. [Online]. Diakses dari https://www.academia.edu/5859314/Jurnal_Fany_Triana_Putri_0911240054.
- Santi, J. T. (2010, 22 April). 60 Tahun Hubungan RI-RRC. *Kompas*. Tanpa Halaman.